

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tanjung Pinang

Nor Sapitri¹, Wahjoe Pangestoeti², Dea Pratama Putri³, Muhammad Rizky Akbar⁴

¹²³⁴Universitas Maritim Raja Ali Haji

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2024

Revised May 05, 2024

Accepted May 10 2024

Available online May 17, 2024

Keywords

Kinerja. Pengelolaan, Kaeuangan Daerah

Keywords:

Performance. Management, Regional Finance



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Analisis kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dikota Tanjungpinang ialah sebuah penelitian yang bertujuan guna mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kota Tanjungpinang. Kajian ini mencakup analisis berbagai aspek seperti pendapatan, pengeluaran, inverstasi dan pengelolaan utang daerah. Tujuannya adalah untuk mengetahui rencana perbaikan guna meningkatkan kuitas pengelolaan keuangan publik di kota Tanjungpinang dengan menganalisis kinerja keuangan daerah secara detail. Kinerja pengelolaan keuangan kota Tanjung pinang diukur dengan metode.

ABSTRACT

Analysis of the performance of local government financial management in the city of Tanjungpinang is a research that aims to evaluate the efficiency and effectiveness of local government financial management in the city of Tanjungpinang. This study includes analysis of various aspects such as income, expenditure, investment and regional debt management. The aim is to find out improvement plans to improve the quality of public financial management in the city of Tanjungpinang by analyzing regional financial performance in detail.

The financial management performance of the city of Tanjung Pinang is measured using the method

PENDAHULUAN

Analisis kinerja keuangan daerah merupakan proses untuk mengetahui seberapa efektif, efisien, dan transparan manajemen keuangan daerah, metode yang krusial digunakan ialah analisis kinerja keuangan daerah. Pengelolaan daerah secara ekonomis, efisien, serta efektif, juga partisipasi, akuntabilitas, serta keadilan dapat menunjang perkembangan perekonomian, dimana pada gilirannya akan mereduksi pengangguran dan tingkatan kemiskinan. Sumber daya manusia dan ekonomi, serta anggaran pemerintah, diperlukan untuk pengelolaan daerah. Masyarakat harus memahami dokumen publik tentang keuangan daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan. Laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas adalah semua laporan keuangan yang harus dipublikasikan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, meningkatkan pertanggungjawaban publik, dan meningkatkan komunikasi kelembagaan.

Akuntabilitas untuk pelaporan kinerja lembaga dan kemampuan lembaga pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dalam melaksanakan akuntabilitas diperlukan pelaksanaan tata kelola lebih efisien, efektif, bersih, dan akuntabel. Mengevaluasi kinerja sistem keagenan pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari pembangunan pemerintahan yang akuntabel, yang berarti pemerintahan yang bertanggung jawab atas bagaimana dana digunakan untuk masyarakat. Penekanan pada akuntabilitas kinerja telah berubah dari "berapa banyak anggaran yang sudah atau sedang dibelanjakan" jadi "berapa banyak kinerja yang telah dicapai serta berapa biaya tambahan yang dibutuhkan untuk mencapai periode rencana yang telah ditetapkan?" "Apakah kita memerlukan kinerja?"

Akuntabilitas adalah istilah yang mengacu pada tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan ataupun ketidakberhasilan suatu organisasi untuk meraih tujuan. Ini dilakukan melalui media akuntabilitas yang digunakan secara berkala pada akhir anggaran. Akuntabilitas pemerintahan mengacu pada sistem birokrasi di mana lembaga pemerintah bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan mereka dalam menjalankan tujuan dan visi misi mereka. Melewati pengukuran serta evaluasi kinerja, dan pengungkapan yang tepat dari perolehan analisa kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) memberikan pertanggungjawaban atas kinerja misi dan fungsi yang diberikan kepada masing-masing instansi dalam hal penggunaan anggaran.

*Corresponding author

Email: norsapitry@gmail.com

METODE

Metode Analisis Deskriptif dapat digunakan dalam memberi bayangan umum mengenai keadaan keuangan Kota Tanjung Pinang, meliputi sumber pendapatan, struktur pengeluaran, dan kebijakan fiskal yang dilaksanakan. Hal ini dapat menjadi dasar analisis lebih lanjut terhadap kinerja keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mardiasmo dalam (Sari et al., 2019)[13] kinerja keuangan dari otoritas lokal dapat diartikan sebagai kapasitas wilayah tersebut dalam menemukan dan mengatur dana lokal yang asli untuk memenuhi keperluan yang mendukung operasi pemerintahan, layanan publik, serta pengembangan wilayah. Hal ini dilakukan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan pemerintah pusat dan memiliki fleksibilitas dalam memanfaatkan anggaran untuk manfaat masyarakat setempat sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Tanjungpinang selama tahun 2019, suatu proses perbandingan dilaksanakan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya tercapai untuk setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tabel yang terdapat pada lampiran memberikan gambaran detail mengenai pencapaian kinerja untuk tiap indikator oleh Badan tersebut di tahun 2019, dan analisis capaian kinerjanya adalah sebagai berikut: Tabel 1. Capain Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ketepatan waktu Penetapan APBD	WTP 31 Des

Pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tentang penyajian laporan keuangan daerah secara baik, sah, efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Namun sejauh ini belum ada opini wajar tanpa pengecualian atas laporan pemeriksaan BPK RI perwakilan provinsi kepulauan tersebut terkait penyampaian laporan keuangan Kota Tanjung Pinang tahun 2019 dimana disampaikan tahun 2020. Kota Tanjung Pinang masih pada tahapan pengujian BPK. Namun usaha yang dilaksanakan Kota Tanjung Pinang dalam menjaga instalasi pengolahan air terus dilakukan pembenahan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk rekomendasi mengenai audit LKPD Kota Tanjung Pinang dalam beberapa tahun terakhir adalah menciptakan a contoh arah perbaikan ke arah yang lebih baik. Keuangan akan datang secara bertahap dan terus menerus. Kecepatan penyusunan peraturan APBD sesuai dengan tujuan 31 Desember ditunjukkan dalam bentuk Perjanjian Bersama Walikota serta DPRD Kota Tanjung Pinang mengenai Rancangan Peraturan Zonasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD) Provinsi Tanjung Pinang. Kota Pinang. Kota Tanjung Pinang mematuhi format Protokol Penyusunan APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 Nomor 33 Ditandatangani Protokol Kesepakatan antara DPRD dan Walikota yang mencakup Lamperda APBD untuk konversi ke APBD, dan APBD murni harus diserahkan maksimal tanggal 30 November untuk APBD murni.

Tabel 2. Tujuan Strategis Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Target	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas penyajian Laporan Keuangan	1 WTP	1 WTP	Tercapai

Tabel di atas menunjukkan bahwa tujuan strategis untuk meningkatkan mutu pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan indikator Kinerja Opini BPK dari penyajian Laporan Keuangan bisa mencapai tujuan, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini Atas Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 yang mengatur tentang Inspeksi Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Audit ini mencakup berbagai komponen seperti Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal tersebut. Berdasar pada keterangan BPK, laporan keuangan Kota Tanjung Pinang mencakup seluruh aspek penting

seperti status keuangan Kota Tanjung Pinang per 31 Desember 2019, pelaksanaan anggaran, tren kelebihan saldo anggaran, dan operasional disajikan secara adil.

Sasaran kinerja yang ingin dicapai dengan sasaran tersebut masuk akal secara universal (WTP). Pendapat Komisi Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah akan dijadikan indikator bagi BPKAD Kota Tanjung Pinang.

BPK Republik Indonesia memberikan opini wajar atas informasi hasil pemeriksaan perwakilan BPK provinsi kepulauan Indonesia tentang penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2019 yang disampaikan pada tahun 2020 (WTP) terkait dengan presentasi informasi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tanjung Pinang Tahun 2019 Target kesiapan LAKIP 2019 mencapai indikator 1 WTP. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mengenai Manajemen Keuangan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk mengirimkan laporan keuangannya kepada walikota dalam waktu dua bulan setelah penutupan tahun fiskal. Sampai saat ini, proses pengiriman laporan keuangan oleh SKPD di Kota Tanjung Pinang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada.

Tabel 3 Capaian Target Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pengelolaan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase BMD yang telah melakukan inventarisasi Aset dengan baik	100%	100%	100%

Untuk mencapai target strategis peningkatan pengawasan dan pemanfaatan aset lokal, Tabel diatas menunjukkan bahwa indikator Kinerja Persentase BMD telah melakukan inventarisasi aset dengan baik dan mencapai target sebesar 100%. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset KotaTanjungpinang bekerja sama untuk membuat Laporan Barang bersama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. Untuk menginventarisasi aset dengan benar dan mencapai target 100%, langkah-langkah berikut diambil:

1. Perbandingan akan dilakukan pada 132 OPD yang terdiri dari 58 OPD dan 74 sekolah secara semester per semester.
2. Hitung persentase OPD yang persediaannya dalam keadaan, baik diberi persentase jumlah OPD dikalikan 100%. Artinya BMD dengan persediaan baik mempunyai tingkat pencapaian tujuan sebesar 100%

Tabel 44. Pengelolaan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	Realisasi	
			Keuangan	Fisik
1	2	3	5	6
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	27.566.553.271	18.964.758.392	68.8%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.955.878.666	7.531.923.794	63%
	BELANJA LANGSUNG	15.610.674.605	11.432.834.598	90.46%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.102.179.605	3.951.296.044	100%
1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-
2	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung	2.364.998.605	1.561.556.250	100%
3	Operasional Rutin Kantor	2.737.181.000	2.389.739.794	100%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.088.320.000	883.659.040	100%
1	Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.088.320.000	883.659.040	100%
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	901.335.000	783.735.480	100%
1	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Non Aparatur	203.175.000	186.342.250	100%
2	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	698.160.000	597.393.230	100%
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	405.890.000	373.244.110	100%
1	Penyusunan laporan Keuangan	282.600.000	267.753.030	100%
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Pragnosis Anggaran Semester Pertama APBD	123.290.000	105.491.080	100%
V	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	6.159.280.000	4.081.905.814	89.02%
1	Penatausahaan Gaji PNSD Kota Tanjungpinang	252.000.000	219.218.400	100%
2	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	268.600.000	74.051.065	55.83%
3	Penyusunan RAPBD / APBD	955.900.000	688.554.059	100%
4	Penyusunan Perubahan RAPBD / APBD	508.770.000	480.239.121	100%
5	Rekonsiliasi Laporan SIMDA Keuangan	1.049.500.000	1.021.865.797	100%
6	Optimalisasi Pemblayaan APBD	337.500.000	218.333.550	100%

Pada Tabel di atas, kita dapat melihat bahwa tujuan strategis untuk meningkatkan pengelolaan pengamanan dan pemanfaatan aset daerah mencapai tujuan seratus persen, karena indikator kinerja persentase BMD telah melakukan inventarisasi aset dengan baik. Untuk mencapai tujuan dari indikator ini, Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah Kota Tanjung Pinang bekerjasama dengan seluruh organisasi kelembagaan daerah Kota Tanjung Pinang untuk memberikan informasi yang tepat waktu sesuai dengan peraturan dan secara informatif dan akurat laporan. Untuk menginventarisasi aset dengan benar dan mencapai target 100%, langkah-langkah berikut diambil:

1. Melakukan perbandingan antara 58 OPD dengan 132 OPD yang terdiri dari 74 sekolah per semester.
2. Hitung persentase OPD yang persediaannya dalam keadaan baik dibagi persentase jumlah OPD dikalikan 100%. Artinya BMD dengan persediaan yang baik mempunyai tingkat pencapaian tujuan sebesar 100%.
3. Melaksanakan pengelolaan BMD secara tepat yang terdiri atas pengelolaan aset, pemasukan, penghapusan pengalihan, dan pemanfaatan aset.

Dalam proses penyampaian laporan BMD di atas, Otoritas Pengelola Aset Keuangan Daerah Kota Tanjung Pinang akan bekerjasama dengan seluruh OPD Tempat Penyimpanan Pengelolaan Aset untuk membantu dalam melakukan entry data pada aplikasi BMD-SIMDA Kota Tanjung Pinang. Untuk memenuhi sasaran kinerja yang diharapkan, OPD menyediakan laporan BMD 100% tepat sasaran dengan cepat, informatif dan akurat.

SIMPULAN

Untuk menentukan seberapa efektif, efisien, dan transparan pengelolaan keuangan daerah, ada proses yang penting yang dikenal sebagai analisis kinerja keuangan daerah. Pengelolaan wilayah tidak hanya memerlukan sumber daya manusia dan ekonomi, yaitu sumber daya keuangan yang ditunjukkan dalam APBN. Keuangan daerah adalah dokumen publik yang harus diketahui masyarakat. Seluruh laporan keuangan daerah harus dibuka untuk umum oleh pemerintah daerah. Laporan keuangan yang tersedia untuk umum meliputi laporan pelaksanaan anggaran, neraca, arus kas, dan laporan keuangan. Akuntabilitas diartikan sebagai ekspresi kewajiban untuk bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi, dan ditetapkan melalui prosedur akuntabilitas yang dilakukan secara berkala pada setiap akhir anggaran. Surat Pernyataan Otoritas Audit Keuangan Republik Indonesia atas penyampaian laporan keuangan daerah yang baik, efektif, efisien, ekonomis, efektif dan transparan. Namun sejauh ini belum ada opini wajar tanpa pengecualian atas laporan hasil audit BPK RI perwakilan provinsi nusantara atas penyampaian laporan keuangan Kota Tanjung Pinang tahun 2019 yang disampaikan pada tahun 2020. Kota Tanjung Pinang bertujuan untuk terus memelihara instalasi pengolahan air, memperbaiki sistem, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk rekomendasi mengenai audit LKPD Kota Tanjung Pinang baru-baru ini. Pendanaan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua penulis atas kerja keras dalam pembuatan jurnal ini. dan juga kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga jurnal ini bermanfaat bagi pembaca.

REFERENSI

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang. (2022). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022.*, 27.
- Nurul Sukma Handayani. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur*. 1-12. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pengertian-keuangan-daerah-7229819c/detail/>
- Riau, K., Pandemi, P., Hermarani, D. A., Indriaty, N., Fisabilillah, J. R. H., Jang, S., Bestari, K. B., & Pinang, K. T. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Provinsi Kepulauan Riau Pada Pandemi Covid 19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(5), 6433-6443.